



## JATUHNYA BASIS ISIS DI TIMUR-TENGAH DAN ASIA TENGGARA

Poltak Partogi Nainggolan\*)

### Abstrak

*Akibat operasi militer secara terus-menerus selama beberapa bulan terakhir ini oleh koalisi Barat pimpinan AS dan Rusia, selain pasukan Pemerintah Bashar al-Assad, posisi ISIS semakin tersudut dan basis strategis mereka di Suriah dan Irak tidak dapat lagi dipertahankan. Perubahan situasi ekstrim ini membawa pertanyaan, apakah ISIS akan segera tereliminasi untuk selamanya? Kalangan yang optimis melihat perubahan drastis ini dengan keyakinan bahwa ancaman terorisme global berakhir. Sedangkan pendapat yang hati-hati mengingatkan, terlalu dini mengambil kesimpulan demikian karena apa yang diusung dan diperjuangkan ISIS sangat ideologis dan masih memiliki daya tarik di tengah situasi dunia penuh ketimpangan. Kehadiran pengikut ISIS dan teroris lintas-negara, serta fenomena meningkatnya radikalisme global, termasuk di Indonesia, menyulitkan sukses perang melawan terorisme global. Artikel ini menganalisis prospek ISIS dan aktivitasnya pasca-kejatuhan basis kekuatan mereka di Timur-Tengah dan Asia Tenggara.*

### Pendahuluan

Pada minggu-minggu terakhir ini, dunia menyaksikan jatuhnya benteng-benteng pertahanan ISIS di Timur-Tengah, yakni Suriah, di Kota Raqqa, yang pernah dijadikan ibukotanya, setelah runtuhnya basis pertahanan mereka di Mosul, Irak. Jatuhnya Raqqa begitu ditunggu-tunggu oleh para musuh ISIS pasca-gempuran 4 bulan lebih Pasukan Kekuatan Demokratik Suriah (*Suriah Democratic Forces/SDF*) dan militer Kurdi (*Peshmerga*), yang didukung

pasukan koalisi AS dan Barat. Posisi ISIS telah diperlemah sebelumnya oleh serangan bertubi-tubi militer Rusia, Pemerintah Bashar al-Assad dan Iran pendukungnya, yang diklaim telah menewaskan tokoh pendeklarasi ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.

Bukan sebuah kebetulan, secara simultan, dunia juga menyaksikan runtuhnya Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, dari pengepungan dan kontrol kekuasaan Kelompok Maute dan Abu Sayyaf yang

\*) *Research Professor* untuk *International and Comparative Politics* pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: pptogin@yahoo.com



pro-ISIS, ke tangan Angkatan Bersenjata Filipina. Perkembangan ini menandai suksesnya perlawanan kekuatan antiteroris sedunia melawan ISIS, dan sebaliknya, kian tersudutnya kekuatan ISIS di markas pusat dan wilayah satelitnya.

Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah nasib organisasi yang paling ditakuti para pemimpin dan warga dunia di awal milenium baru ini akan berakhir? Tulisan ini menganalisis, apakah jatuhnya basis pertahanan ISIS di Suriah dan Marawi, Filipina Selatan akan benar-benar mengakhiri riwayat ISIS. Analisis melihat kaitannya dengan perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung di dunia dewasa ini dan dampaknya terhadap masa depan stabilitas keamanan di tingkat global dan kawasan.

### Perkembangan Lingkungan Strategis

Pasca-dinyatakannya gelar operasi militer berhenti oleh Pemerintah Filipina adalah terlalu dini menyatakan Filipina telah sukses menghancurkan upaya mengeksplor ekstrimisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula menyatakan bahwa Filipina dan negara-negara di kawasan ini telah memenangi pertarungan melawan ancaman dan kekerasan paling serius serta radikalisme dan ekstrimisme. Pertempuran boleh saja sudah dimenangkan, tetapi itu baru di tempat tertentu, dan untuk sesaat. Sedangkan kawasan ini sendiri belum terbebas sepenuhnya dari perkembangan lingkungan strategis yang mendukung aktivitas teroris internasional.

Sel-sel teroris dan kelompok radikal yang sejak semula memperjuangkan negara tersendiri di Mindanao, Filipina Selatan, tetap aktif bekerja, padahal wilayah inilah tempat yang subur menghasilkan pemeluk dan pengikut baru ideologi ISIS. Oleh karena itu, setelah dikuasainya kembali Kota Marawi oleh Pemerintah Filipina, ancaman ISIS akan menyebar ke dan muncul di wilayah Filipina lainnya.

Kondisi masyarakat yang masih dominan ditandai dengan kemiskinan dan keterbelakangan serta meningkatnya kesenjangan dan ketidakadilan akibat kebijakan yang keliru dan *bad governance* tetap rawan memotivasi bangkitnya kembali setiap upaya untuk mencari dan menjustifikasi ideologi perlawanan dan solusi

tandingan (alternatif) dari stagnasi masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat di kawasan. Ketidakpuasan berkembang dan berkepanjangan, yang jika tidak diberikan kanalisasi masalah dapat berujung pada reaksi kemarahan atas situasi yang berkembang dan menghidupkan kembali kenangan atas kejayaan masa lalu (glorifikasi) gagasan “khilafah”, yang menjadi penggerak kelompok radikal selama ini.

Lebih spesifik lagi, terus digaungkannya penegakan khilafah di berbagai negara, dan belum berakhirnya pemahaman atas aspirasi khilafah yang keliru, yang seolah belum pernah diimplementasikan sama sekali dalam sejarah dunia, akan membuat ideologi yang diusung dan dikampanyekan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*), yang kadang pula disebut ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant*), IS (*Islamic State*), atau Daesh (*al-Dawla al-Islamiya fil Iraq wa al-Sham*), mampu menarik dan memperoleh energi baru dari para pengikut baru mereka di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan Asia Tenggara secara lebih luas. Kampanye radikalisme, jika tidak di-*counter*, dapat menciptakan kerawanan dari jangkauan pengaruh mereka di negara-negara Asia Tenggara yang masih memiliki kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan yang tinggi di antara penduduknya.

### Prospek Keamanan Global

Tidaklah berlebihan dikatakan, selama ini dunia telah melihat aksi balas dendam para pengikut dan pendukung ISIS, yang telah menjadi karakter perlawanan ideologi ISIS di mana-mana. Praktik bumi hangus, tidak menyisakan apapun, dan aksi *an eye for an eye* ini tidak hanya dilakukan oleh Kelompok Al-Qaeda dan Taliban, tetapi juga ISIS, penerus ideologi terorisnya. Menjelang keruntuhan wilayah pendudukan mereka di Raqqa, ISIS mengeksekusi ratusan—paling sedikit 116 orang—warga sipil di Gurun Suriah, yang mereka klaim sebagai aksi balasan, termasuk dengan menggunakan pisau.

Larinya para teroris dengan berbagai latar belakang kewarganegaraan dari pusat perjuangan ISIS di Suriah, yang disebut sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTFs) ke negara asal, terutama Asia Tenggara sebagai pilihan mandala perlawanan di kawasan, harus diwaspadai oleh aparat

keamanan masing-masing negara yang akan dilalui dengan tindakan deteksi dini dan kerja sama internasional di antara mereka. Karena kontrol yang ketat di wilayah perbatasan, seperti Turki, FTFs lari ke Libya, atau terkonsentrasi pelarian mereka di perbatasan Turki-Suriah-Irak. Namun, dengan kelihaiannya mereka sebagai aktor non-negara transnasional, mereka bisa menembus blokade dan pemantauan aparat keamanan.

Lembaga riset keamanan Amerika Serikat (AS), Soufan Center, melaporkan, terdapat minimal 5.600 FTFs, termasuk perempuan dan anak-anak, yang akan pulang ke 33 negara asal mereka. Lebih dari 40.000 FTFs dari 100 negara telah bergabung dengan ISIS pasca-diumumkannya pembentukan “kekhalifahan” pada tahun 2014, setelah berhasil direbutnya sebagian wilayah di Suriah dan Irak. Lima WNI yang terakhir berusaha masuk ke Suriah juga telah dideportasi ke Indonesia. Mereka yang kembali dapat melanjutkan perjuangan mereka di negeri asalnya. Jatuhnya basis mereka di Timur-Tengah akan memotivasi mereka mencari solusi membangun “kekhalifahan” baru di wilayah yang masih kondusif, yakni Asia Tenggara dan Afrika. Dengan demikian kehadiran mereka akan memberikan tingkat risiko yang lebih tinggi bagi keamanan domestik dan kawasan.

Munculnya *Violent Extremist Organizations* (VEOs) atau *Violent Extremist Groups* yang sangat diwaspadai di AS adalah indikasi kuat dari sulitnya menghadapi ancaman terorisme, tidak hanya sekadar ancaman yang datang dari ISIS, tetapi juga organisasi senapas yang namanya bisa saja berlainan. Di AS, akhir-akhir ini, isu ini gencar dibicarakan dan memenuhi ruang-ruang seminar, terutama di pusat politik dan pembuatan kebijakan AS, yaitu Washington D.C, termasuk yang dilakukan dalam bentuk Konferensi Pertahanan mengenai VEOs yang diadakan oleh Departemen Pertahanan pada 23-24 Oktober 2017, yang sedianya akan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Para pengikut VEOs baru dan para teroris lokal baru rawan bermunculan di dalam negeri pasca-runtuhnya basis-basis ISIS di mancanegara, tanpa harus ke luar negeri untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Sebagai konsekuensinya, *homegrowing*

*terrorism* menjadi ancaman baru di Barat dan juga kawasan, yang sebelumnya dikatakan telah sukses memerangi langsung ISIS di pusat dan satelitnya.

## Dampak bagi Indonesia

Pasca-kejatuhan basis perlawanan ISIS di Suriah dan Marawi, aparat keamanan harus mengantisipasi kemungkinan serangan teroris pro-ISIS di wilayah Indonesia sebagai salah satu bentuk aksi balas dendam. Ini terutama terhadap aset Pemerintah Filipina di Indonesia pasca-tewasnya tiga tokoh ISIS di kawasan akibat gempuran terakhir militer Filipina. Pengalaman empirik telah memperlihatkan saat Kelompok MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) terdesak oleh gelar operasi militer Filipina pada tahun 2000 di Mindanao, kelompok radikal pendukung mereka di Indonesia kemudian melancarkan aksi terorisme terhadap rumah Dubes Filipina di Jakarta.

Aksi pembalasan diperkirakan akan dilakukan, mengingat akan terjadi proses suksesi alamiah di antara tokoh ISIS di kawasan, melibatkan tokoh ISIS asal Indonesia, Bachrum Naim yang masih berkeliaran di Timur-Tengah dan Aman (Oman) Abdurrahman yang terus menyebarkan pengaruh dan mencari pengikut barunya di Indonesia, memperebutkan pengganti Isnilon Totoni Hapilon dan Dr. Ahmad Mahmud, penggalang dana dan aktifis ISIS di Filipina Selatan asal Malaysia. Sekalipun sempat dilaporkan telah muncul pengikut baru ISIS di Malaysia dan Singapura, namun didirikannya basis ISIS dan aksi-aksi terorisme di Malaysia lebih sulit terjadi dibandingkan dengan kemungkinan di Indonesia, karena masih berlakunya ISA (*Internal Security Act*), yang menyulitkan para pengikut ISIS asal Malaysia untuk beroperasi secara bebas.

Sebaliknya, di Indonesia, situasinya tetap kondusif, karena masih terbatasnya suprastruktur hukum yang ada, yakni masih terbatasnya kapasitas UU Antiterorisme yang ada untuk bisa mengatasi ancaman yang datang secara optimal. Terkait ancaman yang datang ini, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), diantisipasi aparat keamanan dan antiteroris Indonesia sebagai sumber ancaman potensial. Itulah sebabnya, mengapa kemudian Densus 88 melakukan operasi penangkapan atas 9 anggota sel JAD

di 4 wilayah yang rawan, yakni Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terlebih setelah adanya temuan intelijen mengenai adanya pelatihan militer dan membuat bom di sana. Penyelidikan mengungkapkan keterlibatan mereka yang ditangkap dengan aksi-aksi terorisme sebelumnya, serta aktivitas Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Bachrum Naim.

Dalam berita terkini, Bachrum Naim sudah terlacak aparat Densus 88 menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan 4 terduga teroris yang ditangkap di akhir Oktober 2017. Lalu-lintas komunikasi digitalnya dengan sejumlah orang terduga teroris itu kemudian terlacak aparat. Oleh karena itulah, analisis digital lebih jauh dilakukan dan didalami oleh aparat keamanan.

Setuju atau tidak, masih diterimanya secara sadar eksistensi kelompok-kelompok radikal, yang mengusung dan memperjuangkan secara terbuka di masyarakat gagasan-gagasan keagamaan yang “konservatif” dan “intoleran”, telah menyediakan suasana yang kondusif bagi aktivitas pro-terorisme. Perkembangan ini meningkatkan radikalisasi di masyarakat, yang juga menguntungkan VEOs, sehingga akhirnya menguntungkan organisasi serta para pengikut dan penerus ISIS.

## Penutup

Upaya ISIS mendirikan basis baru di pedalaman Indonesia yang sulit dijangkau dan diawasi aparat keamanan dan antiterorisme, tetap potensial dilakukan. Dengan masih terbatasnya kewenangan hukum yang diberikan undang-undang kepada aparat keamanan dan antiterorisme untuk menindak FTFs yang kembali, peluang para pengikut dan penerus ISIS di Indonesia untuk melakukan aksi-aksi atau serangan terorisme baru tetap rawan terjadi. Sebagai konsekuensinya, UU Anti-Teroris harus segera diselesaikan, terutama agar pemerintah bersama masyarakat dapat segera melakukan kampanye *counter-radicalism* secara luas di masyarakat, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, mulai dari pemuka agama, pendidik (guru), tokoh masyarakat, elit politik, parpol, ormas, LSM, pemuda, mahasiswa, dan lain-lain.

Selain itu, penting dilakukan perbaikan manajemen rumah tahanan (*prison management*), dengan memisahkan narapidana teroris dan kriminal lain, untuk mencegah tersebar atau terpaparnya pemikiran mereka oleh ideologi kekerasan. Upaya deradikalisasi lebih jauh tentu saja harus dilakukan terhadap para mantan narapidana teroris. Selain itu juga langkah re-edukasi dan rehabilitasi para pengikut dan pendukung ISIS di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini tidak mudah diimplementasikan, karena menyangkut ideologi—yakni nilai-nilai yang sudah diyakini dan tertanam secara mendalam, serta terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku (Ebenstein, 1958)—para pengikut dan pendukungnya.

## Referensi

- “Bachrum Naim Diduga Berikan Instruksi”, *Kompas*, 26 Oktober 2017, hlm. 2.
- Ebenstein, William. 1958. *Today's Ism*. New Jersey: Prentice-Hall.
- “IS Balas Dendam, 116 Warga Dieksekusi”, *Media Indonesia*, 24 Oktober 2017, hlm. 4.
- “Milisi NIIS Terkepung di Kota Deir Ezzor”, *Kompas*, 30 Oktober 2017, hlm. 8.
- Schmitt, Eric. “The Flood of ISIS fighters that wasn't”, *The New York Times International Edition*, October 25, 2017, p. 3.
- “Tentara Serbu Benteng Terakhir IS”, *Media Indonesia*, 27 Oktober 2017, hlm. 13.
- Villamor, Felipe. “ISIS threat in Philippines spreads”, *The New York Times International Edition*, October 26, 2017, p. 5.
- “5.600 Mantan ISIS Pulang ke Negara Asal”, *Suara Pembaruan*, 25 Oktober 2017, hlm. 16.